

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan, 2000, "*Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*", Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008 "*Metode Penelitian Hukum*", Mandar Maju, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2015 "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, Jakarta.

Kamal Hidjaz, 2010 "*Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Pustaka Refleksi, Makassar.

Muhammad Fauzan, 2010 "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Edisi revisi, STAIN Press, Purwokerto.

Prajudi Atmosudirjo, 1978 "*Hukum Administrasi Negara*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HR, 2011 "*Hukum Administrasi Negara*", Rajawali Pers, Jakarta.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, "*Filsafat Hukum*", Rajawali Press, Depok.

Soerjono Soekanto, 2012 "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press.

Soejono Soekanto, 2009, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Pers, Jakarta.

B. Skripsi

Afriani, Vina Nurul, "Efektivitas Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Bogor" *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Wijaya, Aditya, "Penerapan E-Government Di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)" *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2015.

Yudistira, Adhika Arya, "Pelaksanaan Sistem Online pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Government yang Berbasis Aplikasi tentang DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kota Pekanbaru" *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2020.

C. Jurnal

- Abikusna, R Agus. *“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Pemerintahan Daerah”* XIII, no. 23, 2019.
- Ali, Edwar. *“Strategi Mengembangkan E-Government Untuk Pemerintahan Daerah”*, Vol. 1, no. 1, 2012.
- A. Zarkasi, S.H., M.H. *“Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,”* 2004.
- Bambang Irawan. *“E-Government Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik”* Vol. 4, no. 3, 2015.
- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, Welson Yappi Rompas. *“Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat.”* Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, no. 37, 2016.
- Dimas Prayogi, Agung Prawijaya, *“Strategi Media Relations Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Dalam Peningkatan Sarana Informasi Publik”*, no. 2, 2022.
- Djaenab. *“Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”*, Vol. 4, no. 2, 2018.
- Irma, Nindya, Budiman Ginting, and Jelly Leviza. *“Penerapan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Binjai”*, Vol. 2, no. 6, 2023.
- Junaidi. *“Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat”*, Vol. 12, no. 2, 2019.
- Moh Gandara. *“Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat”*, Vol. 2, no. 3, 2020.
- Novalia, Deby, Gultom Etika, and Khairina Lubna. *“Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik”*, Vol. 10, no. 1, 2024.
- Nur, Sri, dan Hari Susanto. *“Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”* Vol. 3, no. 3, 2020.
- Prayogi, Dimas, dan Agung Prawijaya. *“Strategi Media Relations Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Luwu Timur Dalam Peningkatan Sarana Informasi Publik”*, Vol. 2, no. 2, 2022.
- Sukendar, Sulastri, Syuryansyah. *“Implementasi E-Government Menuju Pelayanan Publik Yang Unggul (Studi Kasus DPMPSTP Kota Cilegon)”*, Vol. 1, no. 1, 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi.

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

E. Website

An-nur.ac.id., "*Permasalahan dan Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia*" di akses dari : <https://an-nur.ac.id/blog/permasalahan-dan-tantangan-otonomi-daerah-di-indonesia.html>

Diskominfo.jambikota.go.id., "*Diskominfo Kota Jambi Adakan Sosialisasi Implementasi SP4NLAPOR dan Aplikasi Sikesal Bagi Admin Penghubung OPD Pemkot Jambi*" diakses dari : <https://diskominfo.jambikota.go.id/diskominfo-kota-jambi-adakan-sosialisasi-implementasi-sp4nlapor-dan-aplikasi-sikesal-bagi-admin-penghubung-opd-pemkot-jambi/>

Fahum.umsu.ac.id., "*Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya*" diakses dari : <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

Fahum.umsu.ac.id, "*Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*", di akses dari : <https://fahum.umsu.ac.id/info/harmonisasi-pemerintah-pusat-dengan-daerah-sebagai-efektifitas-sistem-pemerintahan/>

Integrasolusi.com “*Mengenal Apa Itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*” diakses dari : <https://integrasolusi.com/blog/mengenal-apa-itu-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe/>

Menpan.go.id, “*Portal Satu Data Kementrian PAN-RB*” di akses dari : <https://1data.menpan.go.id/>

News.unair.ac.id “*Pelaksanaan E-Government di Indonesia*” di akses dari : <https://news.unair.ac.id/id/2020/12/22/pelaksanaan-e-government-di-indonesia/>

Ombudsman.go.id., “*Dilema Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Tata Kelola Pelayanan Publik*”, di akses dari : <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dilema-sistem-pemerintah-berbasis-elektronik-dalam-tata-kelola-pelayanan-publik>

Seputar birokrasi, “*Kurangnya Koordinasi Antar Instansi: Penyebab, Dampak, dan Solusi*” di akses dari <https://seputarbirokrasi.com/kurangnya-koordinasi-antar-instansi-penyebab-dampak-dan-solusi/>

Setkab.go.id., “*Ihwal Urusan Pemerintahan Umum*”, di akses dari : <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>

Sipas.id., “*E-Government adalah: Pengertian, Keuntungan, dan Tantangannya*”, di akses dari : <https://www.sipas.id/blog/e-government-adalah/>

Spbe.jambikota.go.id., “*Tingkatkan Keamanan Informasi SPBE, Diskominfo Kota Jambi Tanda Tangani PKS Bersama BSrE BSSN*” di akses dari : <https://spbe.jambikota.go.id/artikel-spbe/read/tingkatkan-keamanan-informasi-spbe-diskominfo-kota-jambi-tanda-tangani-pks-bersama-bsre-bssn>